

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rawalo

Mila Purwaningsih¹, Hardiyanto Wibowo², Eko Hariyanto³, Edi Joko Setyadi⁴

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 20 Desember 2025

Revised: 06 Januari 2026

Accepted: 02 Maret 2026

Keywords:

Kompetensi Aparat Desa,
Sistem Pengendalian Internal,
Transparansi, Sistem
Informasi Akuntansi,
Akuntabilitas

ABSTRACT

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sensus, dimana seluruh populasi yang berjumlah 36 aparat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa dijadikan sebagai sampel. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan Partial Least Square (PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 3.0. Pengujian dilakukan melalui outer model dan inner model.

Originalitas/Novelty: Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian simultan kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan transparansi dalam konteks pengelolaan dana desa pada tingkat kecamatan.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

Implikasi: Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas melalui penguatan sistem dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Research Objective: This study aims to analyze the effect of village apparatus competence, internal control systems, accounting information systems, and transparency on the accountability of village fund management in Rawalo District, Banyumas Regency.

Research Method: The study employs a quantitative approach using a census method, involving all 36 village officials directly engaged in village fund management as respondents. Data were collected through questionnaires using a Likert scale and analyzed using Partial Least Squares (PLS) with SmartPLS 3.0 software. The analysis consisted of outer model and inner model testing.

Originality/Novelty: The novelty of this study lies in the simultaneous examination of competence, internal control systems, accounting information systems, and transparency in village fund management accountability at the sub-district level.

Research Findings: The results indicate that village apparatus competence does not have a positive effect on accountability, while internal control systems, accounting information systems, and transparency positively affect the accountability of village fund management.

Implications: These findings provide practical implications for village governments to enhance accountability through strengthening internal systems and transparency in financial management.

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Mila Purwaningsih

Progam Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Purokerto, Purwokerto, Indonesia

Email : milaapurwaningsih@gmail.com

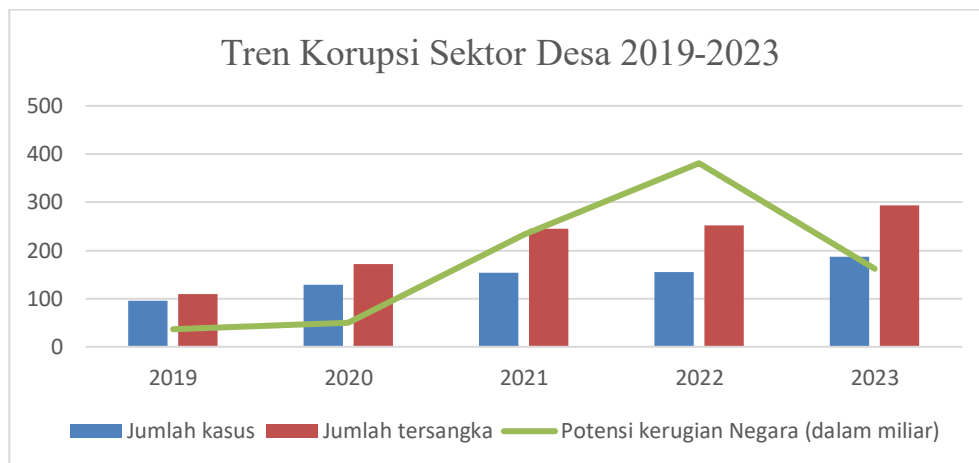
Pendahuluan

Pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar bagi para pemangku kepentingan di tingkat desa, terutama bagi perangkat pemerintahan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa wajib menerapkan prinsip akuntabilitas. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa diwujudkan melalui pertanggungjawabannya yang jelas pada setiap tahapan, pelaksanaan tugas sesuai kewenangan, serta adanya mekanisme pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak berwenang dan masyarakat. Dimana seluruh kegiatan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tercapainya tata kelola pemerintah yang baik (*Good Village Governance*). Hal ini memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (Polutu et al., 2022). Dengan kata lain, pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintah desa yang akuntabel dan berintegritas.

Akuntabilitas berperan sebagai bentuk kontrol terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran dana desa. Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui penyajian dan pelaporan secara transparan atas seluruh aktivitas pengelolaan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan yang relevan, andal dan dapat dipertanggungjawabkan (Nislandi & Munari, 2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan resiko korupsi. Ketika akuntabilitas diterapkan dengan baik, setiap penggunaan anggaran diwajibkan untuk dipertanggungjawabkan secara jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi pengelolaan dana desa di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas yang di harapkan. Berdasarkan data dari pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan tren korupsi sektor desa di Indonesia konsisten naik sejak 2019 sampai 2023. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengungkapkan bahwa kasus korupsi di tingkat desa menempati posisi paling tinggi dari sektor lain sepanjang tahun 2023.

Grafik 1. Tren Korupsi Sektor Desa dalam Lima Tahun (2019-2023)



Sumber : www.antikorupsi.org

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa masih cukup tinggi, menandakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem keuangan desa (*Siskeudes*) masih terdapat beberapa kelemahan dalam kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi. Terkait dengan akuntabilitas ditemukan masalah yang berada dalam pemerintahan Desa di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dan kemampuan aparat desa dalam mengoperasikan sistem keuangan desa (*Siskeudes*).

Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa semakin meningkat seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan keuangannya sendiri. Tujuannya adalah agar desa mampu meningkatkan efisiensi,

efektivitas, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan desa yang mandiri selaras dengan cita-cita bangsa. Dengan diberlakukannya regulasi tersebut, desa diharapkan mampu berperan aktif dalam proses pembangunan dengan meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, serta kapasitasnya dalam mengelola dana desa (Ali & Boku, 2023).

Sebagai bentuk implementasi dari regulasi tersebut, Kabupaten Banyumas menjadi salah satu wilayah yang melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kabupaten Banyumas merupakan wilayah yang terdiri dari 27 Kecamatan, dengan total 301 desa dan 20 Kelurahan. Kecamatan Rawalo merupakan salah satu dari 27 Kecamatan terdapat di Kabupaten Banyumas dan memiliki 9 desa. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan anggaran desa untuk Kecamatan Rawalo pada Tahun 2024 dan 2025 dengan rincian berikut :

Tabel 1 Rician Alokasi Dana Desa Kec. Rawalo Kab. Banyumas 2024 dan 2025

Desa	2024		2025	
	Alokasi Dana Desa Minimal	Alokasi Dana Desa Variable	Alokasi Dana Desa Minimal	Alokasi Dana Desa Variable
Losari	Rp.392.042.084	Rp.130.104.269	Rp.397.103.6949	Rp.131.784.015
Menganti	Rp.392.042.084	Rp.81.475.193	Rp.397.103.6949	Rp.82.527.101
Banjarparakan	Rp.392.042.084	Rp.104.521.394	Rp.397.103.6949	Rp.105.870.845
Rawalo	Rp.392.042.084	Rp.89.799.8791	Rp.397.103.6949	Rp.90.959.264
Tambaknegara	Rp.392.042.084	Rp.143.789.401	Rp.397.103.6949	Rp.145.645.833
Sidamulih	Rp.392.042.084	Rp.132.769.103	Rp.397.103.6949	Rp.134.483.254
Pesawahan	Rp.392.042.084	Rp.76.800.076	Rp.397.103.6949	Rp.77.791.624
Tipar	Rp.392.042.084	Rp.147.591.824	Rp.397.103.6949	Rp.149.497.348
Sanggreman	Rp.392.042.084	Rp.121.753.245	Rp.397.103.6949	Rp.123.325.173
Jumlah	Rp.3.528.378.756	Rp.1.028.604.384	Rp.3.573.932.841	Rp.1.041.884.459

Sumber : <https://static.banyumaskab.go.id>

Bersarnya anggaran yang dikelola oleh desa harus diimbangi dengan tanggungjawab yang tinggi. Hal ini merupakan langkah penting dalam pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk setiap kegiatan yang telah dilakukan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penggunaan dana desa. Setiap tahapan dalam proses ini perlu didokumentasikan dengan baik agar setiap aliran dana dijelaskan secara jelas, terorganisir dan mudah dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana yang baik tidak hanya menuntut ketelitian dalam pencatatan dan pelaporan, tetapi juga prinsip tata kelola keuangan yang efisien dan efektif (Tuti Dharmawati et al., 2021)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh pegawai aparatur sipil negara, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta sikap perilaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas secara profesional. Kompetensi menjadi variabel penting yang perlu diteliti, mengingat desa memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa. Dengan meningkatnya kompetensi aparat desa diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pernyataan tersebut di dukung penelitian yang dilakukan (Daud et al., 2024), (Polutu et al., 2022) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Kadek Hariani et al., 2022), (Sri Putri & Mahmud, 2023), (Nisak et al., 2022) menyatakan bahwa kompetensi aparat desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

Selain kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal juga memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal adalah proses yang terstruktur yang dijalankan sebagai mekanisme pengendalian dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan dan kegiatan operasional dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian sistem pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai pedoman untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan menjadi kunci utama dalam mewujudkan transparansi. (Nislandi & Munari, 2023). Pernyataan tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan (Nislandi & Munari, 2023), (Puspa et al., 2020), (Polutu et al., 2022) yang menyatakan bahwa system

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian yang dilakukan (Murti & Maharani, 2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Disisi lain sistem informasi akuntansi memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari organisasi yang memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengelompokkan, menghasilkan, dan menyampaikan informasi keuangan yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan baik oleh pihak eksternal, seperti pemeriksa pajak, investor, dan kreditor (Polutu et al., 2022). Dengan demikian, penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana desa sangat berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem Informasi Akuntansi yang berjalan dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap tata kelola dana desa. Pernyataan tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan (Polutu et al., 2022), (Dewi Ratna et al., 2024), (Ali & Boki, 2023) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian yang dilakukan (Murti & Maharani, 2023) yang menyatakan bahwa system informasi akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sementara itu transparansi memiliki peran penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena bertujuan untuk memastikan aparatur desa bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, etika, serta sesuai amanah yang dipercayakan kepada masyarakat terakait pengelolaan dana desa, sekaligus sebagai sarana memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terkait progam, kebijakan, dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan (Fajri&Julita,2021). Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat melakukan pengawasan sehingga potensi kecurangan dapat diminimalkan. Pernyataan tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan (Liana & Nugroho. W.S, 2022), (Fajri & Julita, 2021) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian yang dilakukan (Sanusi & Riyadi, 2023) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Teori keagenan (*Agency Theory*) di sektor publik menjelaskan bahwa pemerintah desa (*agent*) secara sadar bertindak demi keuntungan pribadi, sementara masyarakat (*principal*) berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat diandalkan untuk menjalankan tugas secara tepat demi kepentingan publik (Nislandi & Munari, 2023). Teori ini menekankan adanya ketidakseimbangan informasi dimana pemerintah lebih banyak memiliki akses informasi dibandingkan dengan masyarakat. Hal ini berkaitan karena sebagai pemerintah (*agent*) memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat (*principal*). Pemerintah desa diharapkan mampu mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Penerapan akuntabilitas dan tranparansi yang baik dapat mengurangi ketidakseimbangan informasi, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa dapat diminimalisir.

Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa telah banyak dilakukan sebelumnya, meskipun menghasilkan kesimpulan berbeda seperti penelitian (Polutu et al., 2022) yang menghasilkan kesimpulan bahwa variabel kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel tranparansi. Hal ini penting karena akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip yang saling melengkapi. Transparansi yang menekankan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa, sedangkan akuntabilitas memastikan pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan penggunaan anggaran desa. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal, transparan dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini berusaha mengungkap seberapa besar faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengembangan Hipotesis

Teori agensi

Teori yang digunakan adalah *agency theory* yang diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976) keterkaitan *agency theory* dalam penelitian ini menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents* (Polutu et al., 2022). *Principals* adalah pihak yang memberikan amanah kepada *agents* untuk

menjalankan tugas atas nama *principals* sebagai pengambil keputusan. Dalam konteks pemerintah sektor publik, *principals* merujuk pada masyarakat, sedangkan *agents* adalah pemerintah, seperti kepala desa dan aparat terkait lainnya. Menurut teori ini, pemerintah atau *agents* seharusnya bertindak demi kepentingan masyarakat. Namun, seringkali pemerintah (*agents*) bertindak berdasarkan pemahamannya sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat (*Principals*) (Tuti Dharmawati et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat (*Principals*) tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pemilihan *agency theory* dalam penelitian ini relevan digunakan dibandingkan *governance theory* dan *stewardship theory*. *Agency theory* mampu menjelaskan secara spesifik potensi konflik kepentingan dan ketidakseimbangan informasi yang sering terjadi antara aparat desa dan masyarakat. Sementara itu, *governance theory* hanya menekankan pada prinsip dan struktur tata kelola yang baik secara umum, sedangkan *stewardship theory* berasumsi bahwa aparat desa selalu bertindak demi kepentingan publik. Berdasarkan hal tersebut *agency theory* menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk menganalisis hubungan antara aparat desa dan masyarakat serta pengaruhnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sejalan dengan hal tersebut, kompetensi aparat desa menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan atau melaksanakan suatu tugas dengan didukung keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, serta disertai sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kompetensi mencerminkan keterampilan dan pengetahuan yang dibarengi dengan sikap profesional dalam bidang tertentu yang membuat seseorang unggul di bidang tersebut (Dewi Ratna et al., 2024). Hal ini sejalan dengan teori agensi dimana masyarakat desa berperan sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai *agent* untuk mengelola dana desa. Dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi aparat desa merupakan faktor krusial yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, karena keikutsertaan sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini didukung penelitian (Zulkifli et al., 2021), (Agustini et al., 2024) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H1 : Kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai bagian integral dari mekanisme pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksana kegiatan. Pengendalian internal dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur pemerintah untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sistem pengendalian internal juga memiliki peran penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena memastikan setiap aktivitas keuangan dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Uyob et al., 2022). Dengan demikian, sistem pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif semata, melainkan juga sebagai instrumen yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Hal ini didukung oleh penelitian (Estrilia et al., 2023), (Dewi Ratna et al., 2024), yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mencatat, dan mengolah data guna menghasilkan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, sistem informasi akuntansi digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan dana desa, termasuk penerimaan dan pengeluaran. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, informasi keuangan dapat diakses dengan mudah, akurat, dan transparan oleh pihak-pihak terkait, seperti masyarakat desa, perangkat desa, dan aparat pengawasan internal pemerintahan. Penerapan sistem informasi akuntansi memungkinkan *agent* untuk menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan andal, sehingga kewajiban pertanggungjawaban kepada *principal* dapat terpenuhi (Hasan et al., 2023). Dengan adanya sistem informasi akuntansi diharapkan potensi terjadinya kesalahan dalam laporan pengelolaan dana desa dapat diminimalisir, pencegahan terhadap praktik penyelewengan dana desa, sekaligus mendorong

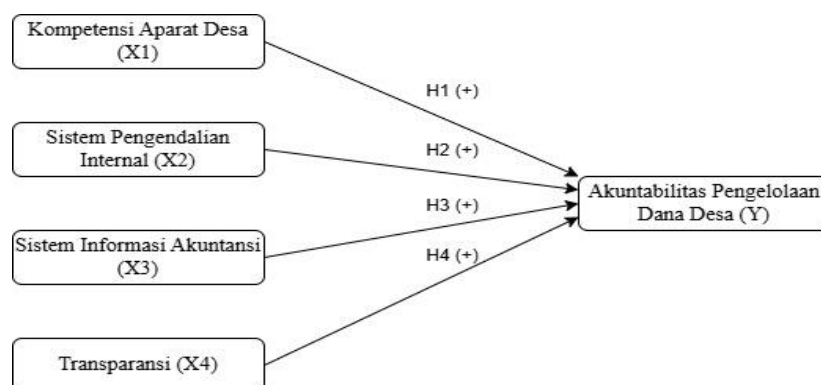
peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan tingkat desa (Pengelolaan & Desa, 2022). Hal ini didukung oleh penelitian (Polutu et al., 2022), (Hasan et al., 2023) yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut dirumuskan hipotesis:

H3 : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Transparansi menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Tingkat transparansi yang tinggi akan berkontribusi pada meningkatnya efektivitas pengelolaan dana desa, karena setiap proses pengalokasian dan pemanfaatan dana dapat dipantau jelas oleh masyarakat maupun pihak yang berkepentingan. Transparansi bukan hanya mencerminkan keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi, tetapi juga menunjukkan bentuk tanggungjawab atas seluruh aktivitas pengelolaan yang dilakukan. Dengan demikian, transparansi berperan sebagai instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran serta memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Apabila aparat desa menerapkan transparansi, maka pengelolaan keuangan desa dapat terwujud secara akuntabel (Liana & Nugroho. W.S, 2022). Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa, aparat desa sebagai agent dapat mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh masyarakat, sehingga akuntabilitas dapat terwujud dan potensi konflik kepentingan maupun penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisasi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Liana & Nugroho. W.S, 2022), (Fajri & Julita, 2021),(Indriasih et al., 2022) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H4:Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka model konseptual dalam penelitian ini menggambarkan bahwa kompetensi aparat desa (X1), sistem pengendalian internal (X2), sistem informasi akuntansi (X3), transparansi (X4) diduga memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Dengan demikian, hubungan antar variabel dapat digambarkan pada Gambar 1.berikut.



Sumber : Data Penelitian 2025

Gambar 1. Kerangka konseptual

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori (*explanatory research*) untuk membuktikan uji hipotesis variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y), di dalam penelitian ini variabel Kompetensi Aparat Desa (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Sistem Informasi Akuntansi (X3), Transparansi (X4) sedangkan variabel bebas (Y) adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Metode analisis data menggunakan bantuan perangkat lunak SmartPLS3.0, model persamaan yang digunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan prosedur *bootstrapping* pada data sampel penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa pada 9 desa di Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas dan diperoleh 36 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus karena seluruh populasi dijadikan responden. Dalam penelitian ini, *instrument* disusun berdasarkan indikator yang diadaptasi dari penelitian (Polutu et al., 2022), (Lihawa et al., 2025) ditujukan kepada 4 aparatur desa yang terkait dengan pengelolaan dana desa, yaitu: (1) Kepala desa selaku PKPKD (Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa), (2) Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), (3) Bendahara Desa, dan (4) Seksi/KASI Perencanaan selaku RPJMDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Kompetensi Aparat Desa	Kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan atau melaksanakan suatu tugas dengan didukung keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, serta disertai sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kompetensi mencerminkan keterampilan dan pengetahuan yang dibarengi dengan sikap profesional dalam bidang tertentu yang membuat seseorang unggul di bidang tersebut (Dewi Ratna et al., 2024).	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan • Keahlian dan kemampuan • Etos kerja dan sikap Edinsion et al ., 2016 dalam (Polutu et al., 2022)	Interval
Sitem Pengendalian Internal	Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai bagian integral dari mekanisme pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksana kegiatan. Pengendalian internal dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur pemerintah untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sistem pengendalian internal juga memiliki peran penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dasa desa, karena memastikan setiap aktivitas keuangan dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan pengendalian • Penilaian resiko • Kegiatan pengendalian • Informasi • Informasi komunikasi • Pemantauan Pengendalian Internal PP No. 60 2008 dalam (Polutu et al., 2022)	Interval

	(Uyob et al., 2022)		
Sistem Informasi Akuntansi	sistem informasi akuntansi memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari organisasi yang memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengelompokan, menghasilkan, dan menyampaikan informasi keuangan yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan baik oleh pihak eksternal, seperti pemeriksa pajak, investor, dan kreditor. (Polutu et al., 2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Keputusan • Ketelitian • Pertanggungjawaban Fadhil, 2020 dalam (Polutu et al., 2022)	Interval
Transparansi	Transparansi merupakan penyampaian informasi keuangan secara terbuka, jujur, dan tanpa diskriminasi kepada Masyarakat, karena Masyarakat berhak mengetahui secara jelas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan dan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku (Lihawa et al., 2025)	<ul style="list-style-type: none"> • Akses informasi yang akurat dan tepat waktu • Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya • Kemudahan akses informasi • Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran (Lihawa et al., 2025)	Interval
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas berperan sebagai bentuk kontrol terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran dana desa. Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui penyajian dan pelaporan secara transparan atas seluruh aktivitas pengelolaan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan yang relevan, andal dan dapat dipertanggungjawabka (Nislandi & Munari, 2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Kejujuran dan keterbukaan informasi • Kepatuhan dalam pelaporan • Kecukupan informasi • Ketepatan penyampaian laporan Nyoman, 2021 dalam (Polutu et al., 2022)	Interval

Hasil dan Pembahasan

Pengujian instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan melibatkan 36 responden yang bertujuan untuk menguji sejauh mana alat ukur yang digunakan mampu menggambarkan serta menghasilkan akurasi pada setiap variabel yang diteliti. Teknik pengujian dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor yang diperoleh dari masing-masing item kuesioner dengan skor total individu. Seluruh proses pengujian instrumen ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Setelah seluruh data penelitian dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data yang mencakup beberapa prosedur pengujian, yaitu : (1) outer model, yang digunakan untuk menuji validitas dan realibilitas (2) inner model, yang digunakan untuk menilai nilai R², Q² dan uji hipotesis.

Table 3. Biodata Responden

Sumber : Data Olahan Ms.Exel

Karakteristik Responden	n	%
Umur (tahun)		
21-30	5	14%
31-39	6	17%
>40	25	69%
Jenis Kelamin		
Pria	31	86%
Wanita	5	14%
Pendidikan Terakhir		
SMA	19	53%
D3	6	17%
S1	11	31%
Jabatan		
Kades	9	25%
Sekdes	9	25%
Kaur keuangan	9	25%
Kaur perencanaan	9	25%

Berdasarkan hasil Tabel 2.1 diatas menunjukkan sebagian responden berada pada kelompok >40 tahun (69%) dengan dominasi laki-laki (86%). Sementara dari aspek pendidikan, responden terbanyak merupakan lulusan SMA (53%), sedangkan lulusan perguruan tinggi relatif lebih sedikit. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun umumnya responden yaitu aparatur desa yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana desa berusia matang, tingkat Pendidikan yang masih didominasi SMA menggambarkan keterbatasan kompetensi yang dimiliki aparat desa serta kualitas sumber daya manusia yang belum optimal.

Uji Outer Model

Uji Validitas

Tabel 4 Hasil Uji Convergent Validity

Variabel	Indikator	Outer Loading	AVE	Keterangan
Kompetensi Aparat Desa (X1)	X1_1	0,815	0,745	Valid
	X1_2	0,874		
	X1_3	0,893		
	X1_4	0,842		
	X1_5	0,869		
	X1_6	0,884		
Sistem Pengendalian Internal (X2)	X2_1	0,834	0,644	Valid
	X2_2	0,832		
	X2_3	0,812		
	X2_4	0,818		
	X2_5	0,756		
	X2_6	0,759		

Sistem Informasi Akuntansi (X3)	X3_1	0,747	0,725	Valid
	X3_2	0,953		
	X3_3	0,852		
	X3_4	0,841		
Transparansi (X4)	X4_1	0,843	0,658	Valid
	X4_2	0,794		
	X4_3	0,797		
	X4_4	0,789		
	X4_5	0,832		
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y_1	0,912	0,781	Valid
	Y_2	0,922		
	Y_3	0,894		
	Y_4	0,795		
	Y_5	0,889		

Sumber :Data Olahan SmartPLS3

Berdasarkan hasil uji validitas melalui outer loading, seluruh indikator pada variabel penelitian yaitu Kompetensi Aparat Desa (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Sistem Informasi Akuntansi (X3), Transparansi (X4), serta Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) menunjukkan nilai loading $> 0,7$. Hal ini berarti seluruh indikator dinyatakan valid dan mampu merepresentasikan masing-masing variabel secara tepat. Dengan demikian, instrumen penelitian yang digunakan layak untuk dilanjutkan pada tahap analisis reliabilitas dan pengujian model struktural. Selain itu, pengujian validitas konvergen dilakukan melalui Average Variance Extracted (AVE), dengan nilai minimal 0,50 untuk memastikan indikator mampu merepresentasikan konstruk diterima.

Uji Realiabilitas

Tabel 5 Composite Realibility

Indikator	Cronbach's Alpha	Composite Realibility
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,929	0,947
Kompetensi Aparat Desa (X1)	0,932	0,946
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,889	0,916
Sistem Informasi Akuntansi (X3)	0,871	0,913
Transparansi (X4)	0,872	0,906

Sumber :Data Olahan SmartPLS3

Pengukuran reliabilitas suatu konstruk dengan indikator menggunakan PLS-SEM melalui program SmartPLS 3.0 dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Realibility. Sebuah konstruk dianggap reliabel jika kedua nilai tersebut $> 0,70$ (Mahfud & Dwi, 2013)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 3.1, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$ dan Composite Realibility $> 0,70$. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan telah memenuhi kriteria reliabilitas atau dapat dikatakan handal serta konsisten dalam mengukur variabel yang diteliti. Selain itu nilai Average Variance Extracted (AVE) pada setiap variabel juga $> 0,50$, yang berarti bahwa masing-masing indikator mampu mempresentasikan variabel laten dengan baik serta memenuhi syarat konvergen.

Uji Inner Model

Tabel 6. Nilai R Square

R Square	Adjusted R Square
----------	-------------------

Akuntabilitas Dana Desa	Pengelolaan	0,791	0,764
----------------------------	-------------	-------	-------

Sumber :Data Olahan SmartPLS3

Berdasarkan hasil Uji R Squere pada Tabel 4.1 nilai R Square untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 0.791, sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0.764. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independent dalam penelitian ini yaitu Kompetensi Aparat desa,Sistem Pengendalian Internal,Transparansi, dan Sistem Informasi Akuntansi, mampu menjelakan variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sebesar 79,1%. Sementara sisanya sebesar 20,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang berada diluar model penelitian.

Tabel 7 Nilai Q-Squared

Variabel Dependen	Q-squared
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,597

Sumber :Data Olahan SmartPLS3

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa nilai Q² sebesar 0,597 atau sudah > 0,6 yang menunjukkan bahwa variabel yang dipengaruhi memiliki relevansi yang prediktif.

Uji Hipotesis

Tabel 8. Uji t Statistik

Mean,STDEV,T-Values, P-Value

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standard Deviasi (STDEV)	T Statisikcs	P Value
Kompetensi Aparat DesaAkuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,227	0,223	0,152	1,496	0,137
Sistem Pengendalian Internal Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,217	0,239	0,093	2,329	0,020
Sistem Informasi Akuntansi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,392	0,377	0,163	2,403	0,017
Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,216	0,220	0,104	2,066	0,049

Sumber : Data olahan SmartPLS3

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil Uji Hipotesis diperoleh nilai *t-statistik* sebesar 1,496 < 2,032 dengan *p-value* sebesar 0,137 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Desa (X1) tidak berpngaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dinyatakan ditolak. Kondisi ini dimungkinkan karena keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya motivasi kerja di Kecamatan Rawalo, yang mengharuskan setiap desa memiliki regulasi yang berbeda terkait penanggung jawab pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan aparat desa sebagai *agent* memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana desa secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sebagai *principal*. Kompetensi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kemampuan aparat desa dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan hubungan keagenan, sehingga mampu memperkecil kemungkinan terjadinya kesenjangan informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Daud et al., 2024) yang menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif dan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sebaliknya, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sri Putri & Mahmud, 2023), (Nisak et al., 2022) menyatakan bahwa Kompetensi Aparat

Desa tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kompetensi aparat desa merupakan faktor penting dalam menungjung kelancaran penggunaan dana desa, namun kemampuan yang dimiliki aparat desa belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, peningkatan kompetensi tidak secara otomatis diikuti dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa apabila tidak didukung oleh komitmen, pengawasan, dan penerapan sistem kerja yang efektif.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil Uji Hipotesis diperoleh nilai *t-statistik* sebesar $2,329 > 2,032$ dengan *p-value* sebesar $0,020 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (X2) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dinyatakan diterima. Mekanisme pengendalian internal di Kecamatan Rawalo tercemin melalui penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan desa secara sistematis. Penggunaan Siskeudes di sembilan desa di Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas sudah berjalan cukup baik, selain itu pihak Kecamatan juga terus melakukan pendampingan rutin untuk meminimalkan kendala yang mungkin terjadi. Sistem ini tidak hanya membantu pemerintah desa dalam menjaga ketertiban administrasi, tetapi juga memudahkan pihak kecamatan untuk melakukan pemantauan dalam memastikan bahwa pengeluaran dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil ini didukung teori agensi yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan aparat desa bertindak sesuai kepentingan masyarakat. Dengan adanya Sistem Pengendalian Internal yang baik, setiap penggunaan dana desa dapat dipantau, diverifikasi, serta dipertanggungjawabkan secara transparan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nislandi & Munari, 2023) dan (Puspa et al., 2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Keberadaan sistem pengendalian internal yang efektif dapat menurunkan tingkat kecurangan yang mungkin terjadi, memastikan bahwa seluruh kegiatan dan penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai prosedur, serta meningkatkan keandalan laporan keuangan. Sebaliknya, apabila sistem pengendalian internal tidak diterapkan dengan baik, hal tersebut dapat memberikan peluang bagi individu untuk melakukan penyimpangan atau tindakan kecurangan.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil Uji Hipotesis diperoleh nilai *t-statistik* sebesar $2,403 > 2,032$ dengan *p-value* $0,017 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (X3) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dinyatakan diterima. Hal ini berarti bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi yang andal dapat meningkatkan ketepatan, keandalan, dan kecepatan penyajian laporan keuangan desa. Hal tersebut selaras dengan kondisi di Kecamatan Rawalo di mana sistem informasi akuntansi sudah berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang digunakan sebagai alat utama dalam tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Aplikasi ini memiliki format baku dan kontrol otomatis yang mencegah kesalahan input, serta setiap transaksi terekam berdasarkan bukti yang sah. Selain itu karena sistem terintegrasi dengan kode rekening dan struktur APBDes, maka kesalahan dalam penempatan akun atau nominal bisa langsung terdeteksi.

Hasil ini didukung teori agensi dimana Sistem Informasi Akuntansi membantu aparat desa sebagai *agent* dalam menyusun laporan keuangan yang lebih sistematis, akurat, transparan kepada masyarakat. Melalui sistem informasi akuntansi yang baik, proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Dewi Ratna et al., 2024), (Ali & Boki, 2023) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi yang

efektif mampu meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta mendukung terciptanya tata Kelola keuangan desa yang lebih akuntabel.

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh nilai *t-statistik* sebesar $2,066 > 2,032$ dengan *p-value* $0,039 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi (X4) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Dengan demikian hipotesis keempat (H4) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dinyatakan diterima.

Implementasi transparansi tersebut terlihat jelas pada sembilan desa di Kecamatan Rawalo bentuk transparansi tersebut tercemin melalui penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat melalui papan informasi publik, baliho APBDes, serta rapat musyawarah desa. Selain itu, setiap tahapan pelaksanaan kegiatan turut diawasi oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendagri N0.20 Tahun 2018, yang mewajibkan pemerintah desa untuk menyediakan informasi pengelolaan keuangan secara terbuka dan mudah di akses.

Hasil ini didukung teori agensi dimana transparansi yang tinggi menunjukkan upaya pemerintah desa sebagai *agent* untuk mengurangi kesenjangan informasi (*Information Asymmetry*) dengan masyarakat sebagai *principal*. Semakin terbuka pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan, maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur desa sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Lihawa et al., 2025) dan (Indriasih et al., 2022), yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa semakin tinggi transparansi dalam hal pengelolaan dana desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 36 responden yang telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal, transparansi, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal yang baik, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta penggunaan sistem informasi akuntansi yang baik mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Sementara itu, kompetensi aparat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang menunjukkan bahwa kemampuan dan pengetahuan aparatur desa belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam melaksanakan tanggung jawab keuangan desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang diisi oleh aparatur desa yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana desa, seperti kepala desa, sekretasi desa, bendahara, dan kasi perencanaan. Hal ini menyebabkan hasil penelitian bergantung pada tingkat pemahaman dan pengalaman responden dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, objek penelitian yang mencakup desa-desa di Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan pengukuran kompetensi aparat desa dengan menggunakan pengukuran lain yang lebih relevan menyesuaikan dengan kondisi objek penelitian yang akan diteliti.

Referensi

Agustini, L. F., Larassaty, A. L., & Sidoarjo, N. U. (2024). *The Influence of Apparatus Competence and Financial Accounting Systems on the Accountability of Village Fund Management Moderated by the Internal Control System*.

- Ali, C. M., & Boki, Z. (2023). Info artikel. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Volume 1 No. 4 Maret 2023 Hal. 259-273*, 1(4), 259-273.
- Daud, R., Blongkod, H., & Pakaya, L. (2024). *Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo)*. 10(1), 70-77.
- Dewi Ratna et al. (2024). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Unibba 59. Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 59-74.
- Estrilia, D., Wijayanti, I., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 20(1), 01-11. <https://doi.org/10.36406/jam.v20i01.681>
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Hasan, F., Hertati, L., & Pebriani, R. A. (2023). Pengaruh Disiplin Kerja, Tingkat Kepuasan Kerja Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Implikasi Pada Kinerja Organisasi Survey Pada Karyawan PT.Sampoerna Agro Tbk. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 238-253.
- Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 3(4), 972-981. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1331>
- Kadek Hariani, N., Komang Merawati, L., & Ayu Nyoman Yuliasuti, I. (2022). Kompetensi Dan Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 6(1), 78-99.
- Liana, S. A., & Nugroho. W.S. (2022). The 5 th Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 2828-0725, 1-15.
- Lihawa, N. I. P., Noholo, S., & Lukum, A. (2025). Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 36-50. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.148>
- Mahfud, S., & Dwi, R. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS7.0 untuk hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Penerbit Andi (Anggota IKAPI).
- Murti, W. A., & Maharani, B. (2023). *Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten purworejo*. 3(1), 55-66. <https://doi.org/10.31603/bacr.11255>
- Nisak, U., Ani, H. N., & Mahmudah, A. (2022). The Influence of Competence of Village Apparatus, Organizational Commitment, and Utilization of Information Technology on the Accountability of Village Fund Management in Pucuk District in 2021. *Melati Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*.
- Nislandi, N. A., & Munari, M. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 143. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1518>
- Pengelolaan, K., & Desa, D. (2022). *Celebes Journal of Community Services*. 1(2), 44-50.
- Polutu, A., Mattoasi, M., & Usman, U. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 89-101.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281-298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Sanusi, S., & Riyadi, P. (2023). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Ilmiah Akuntansi*, 11(2), 91-106. <https://doi.org/10.34208/mia.v11i2.34>
- Sri Putri, A. M., & Mahmud, M. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Bulango Selatan. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 325-339.
- Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, & Satira Yusuf. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 3(1), 34-42. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>

- Uyob, S., Nugroho, E. A., & Diansari, R. E. (2022). Antecedent factors affecting accountability village fund management. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 4(1), 34-41. <https://doi.org/10.36067/jbis.v4i1.122>
- Zulkifli et al. (2021). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim* (Vol. 6, Issue 1). www.djpk.kemenkeu.go.id